

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2013 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan masih mengacu pada Peraturan Kepala LAN Nomor 239/1X/6/8/2003 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2013 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 – 2016, berpedoman pada Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2013 dan Penetapan Kinerja Tahun 2013.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 – 2016 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan daerah.

RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

B. VISI DAN MISI

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi Pemerintah.

Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang merupakan perwujudan dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagai Bupati Mandailing Natal periode 2011-2016 adalah : **“MEWUJUDKAN MANDAILING NATAL YANG AGAMIS, CERDAS, SEHAT DAN SEJAHTERA”**. Visi tersebut terkait dengan Visi Kabupaten Mandailing Natal dalam RPJP 2005-2025 yaitu :

“KABUPATEN MANDAILING NATAL SEBAGAI DAERAH AGROPOLITAN DAN AGROWISATA YANG RELIGIUS, MAJU, MANDIRI DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”

Oleh karena itu, untuk menciptakan keharmonisan dan perwujudan visi pada RPJP Kabupaten Mandailing Natal 2005 – 2025 maka dilakukan penerjemahan visi kampanye Kepala Daerah terpilih kedalam RPJMD Kabupaten Mandailing Natal 2011 – 2016 sehingga dirumuskan kerangka visi Kabupaten Mandailing Natal 2011 adalah :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT MANDAILING NATAL YANG RELIGIUS, CERDAS, SEHAT, MAJU DAN SEJAHTERA”

Penjelasan Visi

1. Masyarakat yang Religius adalah terwujudnya kehidupan beragama yang mampu menjadi katalisator pembangunan dan kemajuan - kemajuan Mandailing Natal

seimbang dengan kemajuan pada dimensi mental – spritual , keagamaan, kebudayaan dan non fisik agar masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan bathin serta berakhlakul karimah.Hal ini merupakan cita - cita untuk meningkatkan kepedulian sosial masyarakat sehingga mau bergotong royong memerangi kemiskinan, pengangguran serta berperan serta dalam pembangunan fasilitas umum.

2. Cerdas adalah terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia Mandailing Natal yang berbasis pada penciptaan masyarakat berpendidikan yang selaras antara intelektual keilmuan, emosional dan spiritual serta meningkatnya kualitas aparatur pemerintah untuk mewujudkan *good governance* dan *clean governance* melalui optimalisasi kinerja pemerintah daerah yang efektif, terpadu dan berkesinambungan.
3. Sehat adalah terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia Mandailing Natal yang berbasis pada penciptaan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani yang didukung oleh lingkungan yang sehat dan tata uang yang harmonis sehingga mampu mengambil keputusan untuk mendorong gerak pembangunan yang terpadu, berjalan mantap dan berkesinambungan.
4. Maju adalah terwujudnya masyarakat Mandailing Natal yang memiliki penguasaan seta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disertai dengan kualitas mental yang mampu mendorong pengembangan sumber - sumber daya dan potensi pembangunan daerah secara menyeluruh sesuai perkembangan global, nasional dan regional serta mampu mendorong peningkatan perekonomian yang berdaya saing tinggi dengan yang berbasis pada simpul-simpul ekonomi rakyat terutama sector pertanian, industry, perdagangan dan jasa, lembaga keuangan dan koperasi, serta pariwisata yang didukung oleh infrastruktur fisik dan non fisik yang memadai.
5. Sejahtera adalah semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memiliki derajat kesehatan baik jasmani maupun rohani yang baik dengan adanya perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar pokok manusia, seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja yang didukung oleh infrastruktur fisik, sosial budaya ekonomi yang

memadai. Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin sehingga secara simultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta adanya iklim berusaha dan berkegiatan yang sehat untuk kelompok – kelompok masyarakat lainnya.

Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, perlu dijabarkan melalui misi. Hal ini tidak terlepas dari pemahaman bahwa misi adalah perwujudan dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi dan memperhatikan misi kampanye Kepala Daerah terpilih. Adapun misi untuk mewujudkan visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama;
2. Meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas;
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan social;
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap infomasi, hukum, politik pembangunan dan pemerintahan;
5. Memberdayakan masyarakat dengan kearifan lokal;
6. Menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha yang didukung SDM dengan keterampilan berbasis karakteristik daerah dan pemerataan kesejahteraan.

Misi 1 Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan sosial Masyarakat yang ditandai dengan semakin eratnya kerukunan antar umat beragama sehingga pertikaian antar agama dapat dihindari, meningkatnya kepedulian sosial masyarakat, menurunnya tindak kriminalitas, serta makin banyaknya aktivitas yang bernuansa keagamaan. Misi ini diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan keagamaan;
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan keagamaan;
3. Peningkatan peran dan fungsi surau, mesjid, MDA sebagai pusat kegiatan belajar keagamaan;
4. Penurunan penyakit masyarakat dan kriminalitas;
5. Penanaman nilai-nilai agama dan budaya semenjak usia dini.

Misi 2 Meningkatkan Akses Pendidikan yang berkualitas

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam membangun sumberdaya manusia yang cerdas yang pada gilirannya akan menjadi manusia yang produktif, kompetitif, dan dilandasi akhlak mulia sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya. Kondisi tersebut ditandai dengan meningkatnya Angka Rata-Rata Lama Sekolah menjadi 8,85 Tahun pada tahun 2013, Angka Melek Huruf mencapai 99,36%, Angka Harapan Hidup mencapai 63,87 Tahun.

Misi ini diarahkan pada :

1. Peningkatan indeks pendidikan penduduk dengan rata-rata lama bersekolah 9 Tahun;
2. Pelaksanaan program pendidikan gratis sampai tingkat SMA dan Subsidi Dana Pendidikan bagi siswa sekolah swasta dari keluarga kurang mampu;
3. Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK);
4. Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM);
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan;
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan;
7. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai kemajuan zaman.

Misi 3 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Sosial

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat Kesehatan masyarakat Mandailing Natal sehingga terwujud sumber daya aparatur yang sehat jasmani dan rohani. Misi ini diarahkan pada :

1. Pencapaian standar pelayanan kesehatan dengan standar yang berlaku secara nasional;
2. Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memenuhi standar;
3. Tercapainya sistem pelayanan kesehatan berbasis pelayanan berkarakteristik daerah;
4. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam program Kesehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat.

Misi 4 Meningkatkan akses Masyarakat terhadap informasi, hukum, politik pembangunan dan pemerintahan

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam menjaga cita-cita mulia yang memerlukan dukungan dari seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Dengan tekad untuk menjaga tata pemerintahan yang baik memiliki konsekuensi melibatkan segenap elemen masyarakat dan kalangan swasta untuk menyediakan peluang dan akses bagi masyarakat untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Misi ini diarahkan pada :

1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik;
2. Peningkatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan pelayanan pemerintahan;
4. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah;

Misi 5 Memberdayakan Masyarakat Dengan Kearifan Lokal

Misi ini merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Mandailing Natal dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan di bidang ekonomi yang dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan serta meningkatnya kemandirian yang berlandaskan persaingan sehat.

Misi ini diarahkan pada :

1. Peningkatan pertumbuhan Ekonomi penduduk;
2. Penurunan Angka Kemiskinan;
3. Penurunan angka pengangguran terbuka;
4. Peningkatan infrastruktur jalan,jembatan dan infrastruktur sosial lainnya.

C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu

kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Adapun tujuan pembangunan daerah Kabupaten Mandailing Natal yaitu :

1. Penataan Kehidupan yang Religius dan Berbudaya Luhur;
2. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan;
3. Peningkatan Derajat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan;
4. Penciptaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
5. Meningkatkan Pendapatan dan tingkat Kesejahteraan Masyarakat.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sesuai dengan tujuan besar tersebut, maka ditetapkan sasaran utama pembangunan daerah Kabupaten Mandailing Natal yaitu :

1. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama;
2. Meningkatnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas;
3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan social;
4. Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi, hukum, politik, pembangunan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dengan kearifan local;
5. Tersedianya lapangan kerja dan lapangan usaha yang didukung sumber daya alam yang lestari dan sumber daya masyarakat yang memiliki keterampilan berbasis karakteristik daerah dan pemerataan kesejahteraan.

D. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2013

Prioritas pembangunan merupakan penetapan target atau hasil yang diharapkan dari program atau kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Program prioritas pembangunan tersebut memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Kabupaten Mandailing Natal.

Dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, maka ada beberapa prioritas pembangunan untuk dilaksanakan pada Tahun 2013. yang menyangkut aspek Pelayanan Umum, Ekonomi, Pendidikan dan Kebudayaan, aspek Kesehatan, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang, Perumahan dan Prasarana Umum, Budaya dan Pariwisata, Ketertiban dan Ketenteraman dan Perlindungan Sosial serta dalam upaya menjawab isu-isu strategis yang diprediksikan akan berkembang dan mempengaruhi kinerja pembangunan Kabupaten Mandailing Natal. Prioritas pembangunan tersebut antara lain:

1. Peningkatan Pelayanan Keagamaan;
2. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Peningkatan Ketahanan Pangan dengan memberdayakan masyarakat petani dan nelayan;
4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi daerah dengan memperkuat perekonomian Kabupaten;
5. Peningkatan Pelayanan Pendidikan dengan mendukung pengembangan pendidikan gratis sampai tingkat SLTA;
6. Peningkatan pelayanan Kesehatan masyarakat ;
7. Memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam dan kekayaan lainnya dengan optimal dan berwawasan lingkungan;
8. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban umum;

E. TARGET INDIKATOR MAKRO TAHUN 2013

Seluruh kebijakan pembangunan yang tertuang dalam sasaran misi dan prioritas pembangunan Tahun 2013 diarahkan untuk mencapai sasaran indikator makro Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2013 sebagai berikut :

Target Indikator Makro Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2013

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
I	Perekonomian		
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,78
2	Laju Inflasi	%	8,53
3	PDRB adh berlaku (dalam jutaan)	Rp	4.723.559,39
4	PDRB adh konstan 2000 (dalam jutaan)	Rp	2.324.601,87
5	PDRB per kapita adh berlaku	Rp	12.874.448
6	PDRB per kapita adh Konstan	Rp	6.194.723
II	Struktur Ekonomi		
	a. Pertanian	Rp	2.203.711,16
	b. Pertambangan dan penggalian	Rp	75.584,43
	c. Industri	Rp	173.782,87
	d. Listrik, Gas dan air minum	Rp	21.052,66
	e. Bangunan	Rp	546.833,63
	f. Perdagangan, hotel dan restoran	Rp	806.311,37
	g. Pengangkutan dan komunikasi	Rp	257.719,68
	h. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	Rp	129.091,14
	i. Jasa-jasa	Rp	679.873,18
III	PENDIDIKAN		
1	Angka Melek Huruf (AMH)	%	99,36
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,85
3	Angka Partisipasi Kasar (APK)		
4	SD/MI	%	97,55
5	SMP/MTs	%	96,15
6	SMA/MA/SMK	%	62,02
47	Angka Partisipasi Murni (APM)		
8	SD/MI	%	94,98
9	SMP/MTs	%	89,39
10	SMA/MA/SMK	%	66,52
IV	KESEHATAN		
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	63,87
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	/klhran hdup	27,5
3	Angka Kematian Ibu (AKI)	/klhran hdup	140
4	Angka Kematian Balita (AKABA)	/klhran hdup	33
5	Angka Kesakitan Malaria	/1000 pnddk	15

V	SOSIAL BUDAYA		
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	473.450
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,9 s/d 1
3	Angka Kemiskinan	%	13,50
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,40
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	71,52

Sumber : RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 – 2016

F. RENCANA KINERJA DAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2013.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya, Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus di organisasi. Penetapan Kinerja yang akan dicapai untuk tahun 2013 adalah sebagai berikut :

**PENETAPAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
TAHUN ANGGARAN 2013**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		5
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pendidikan Keagamaan	1	Jumlah Guru-guru TPA/MDA dan Pondok Pesantren yang mendapat insentif dari Pemkab Mandailing Natal.	2005 Orang
		2	Jumlah Pondok Pesantren yang melaksanakan Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	18 Ponpes
		3	Jumlah Pondok Pesantren yang melaksanakan Musabaqoh Qira'atil Kutub (MQK) Tk. Kabupaten Mandailing Natal	23 Ponpes
2	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam bidang Pendidikan Keagamaan	1	Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tk. Kabupaten Mandailing Natal	470 Orang
		2	Pembinaan Qori' Qori'ah dan Hafiz Hafidzah	34 Orang
		3	Penyelenggaraan Festival Nasyid Tk. Kabupaten	46 Group
		4	Melaksanakan STQ tk. Provinsi Sumatera Utara	16 Orang
		5	Pembinaan Lembaga Pembinaan Tilawatil Qur'an (LPTQ)	1 Unit
		6	Pembinaan Lembaga Pembinaan Pengembangan Seni Nasyid (LPPSN)	1 Unit
3	Terwujudnya Pengetahuan dan Pengamalan masyarakat agama	1	Persentase Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW	80 %
		2	Persentase pelaksanaan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW	80 %
		3	Pemberangkatan dan pemulangan pelaksanaan calon Jemaah Haji	550 orang
4	Tercapainya wajib belajar 12 Tahun dan peningkatan Indeks pendidikan penduduk	1	Adanya kebijakan daerah tentang wajib belajar	Peraturan Bupati
		2	Peningkatan angka Melek Huruf	99,36 %
		3	Rata-rata usia lama bersekolah	8,85 Tahun

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		5
		4	Persentase pelaksanaan pemberian Dana BOS untuk tiap-tiap jenjang pendidikan	SD – SLTA
5	Terlaksananya kebijakan Pendidikan Gratis sampai tingkat SLTA Negeri dan Subsidi Dana Pendidikan bagi Siswa sekolah swasta dari keluarga kurang mampu	1	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Gratis	SD - SLTA
		2	Jumlah SD Swasta	10 UNIT
		3	Jumlah SMP Swasta	7 UNIT
		4	Jumlah SMA swasta	3 unit SMA
		5	Jumlah SMK Swasta	4 unit SMK
		6	Frekuensi pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa dan Mahasiswa Miskin Berprestasi	1 X /Tahun
6	Meningkatnya kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan di Kabupaten Mandailing Natal	1	Angka pelaksanaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	50 KKG
		2	Persentase Guru Eksakta yang mendapat pelatihan	40%
		3	Pelaksanaan pembayaran bantuan untuk Guru Wiyata Bhakti dan TKS	805 Guru
		4	Jumlah SD terpencil yang mendapat bantuan/insentif	63 Sekolah
		5	Persentase Tenaga Pendidik yang telah memiliki kompetensi/sertifikasi	80%
		6	Persentase Sekolah yang memiliki Perpustakaan	30 %
		7	Pelaksanaan pelayanan perpustakaan keliling untuk meningkatkan minat baca anak	80 %
7	Berkurangnya kesenjangan kualitas pendidikan antar kecamatan/wilayah	1	Persentase pelaksanaan Rehabilitasi Gedung Sekolah	23 Kecamatan
		2	Perentase pelaksanaan biaya operasional TK/PAUD	35 %
		3	Persentase Pengadaan mobiler pendidikan pada tiap jenjang tingkat Pendidikan	23 Kecamatan
		4	Persentase pelaksanaan pengadaan biaya operasional pada tiap-tiap tingkat pendidikan.	SD-SLTA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		5
		5	Pembangunan gedung sekolah baru	2 gedung
8	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan	1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	97,55%
		2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	96,15%
		3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	62,02%
9	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan	1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	94,98%
		2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS	89,39%
		3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK	66,52%
10	Meningkatnya daya saing lulusan setiap jenjang pendidikan	1	Persentase sekolah yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	SD – SLTA 100 %
		2	Persentase Sekolah yang menerapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)	SD=SLTA 100 %
		3	Persentase sekolah yang menggunakan Teknologi Informasi (TI) dalam proses belajar mengajar	50 %
		4	Persentase sekolah yang memiliki Laboratorium.	80 %
11	Tercapainya Standar Pelayanan Kesehatan secara Nasional	1	Peningkatan Angka harapan hidup masyarakat	63,87 Tahun
		2	Menurunnya angka kematian bayi	27,5/1000 kelahiran hidup
		3	Menurunnya angka kematian balita	33/1000 kelahiran hidup
		4	Menurunnya angka kematian ibu melahirkan	140/100000 kelahiran hidup
		5	Menurunnya angka penderita Penyakit Malaria	15/1000 penduduk
		6	Persentase angka prevalensi TB paru	228/100000 penduduk
		7	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap	87 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		5
12	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kesehatan yang memenuhi standar	1	Pelaksanaan Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	4 Puskesmas
		2	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1 x /Tahun
		3	Frekuensi pelaksanaan pengawasan Apotik dan Toko Obat	7 Kecamatan
		4	Pemberian Bantuan Operasional Puskesmas	26 Puskesmas
13	Tercapainya Sistem Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Sosial Berbasis Pelayanan berkarakteristik Daerah	1	Persentase pelayanan Kesehatan Peserta JAMKESDA	100%
		2	Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JAMKESMAS	100%
		3	Jumlah Panti Sosial aktif yang di bina Pemerintah Daerah	1 Panti Asuhan Siti Aisyah
		4	Pemberdayaan anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	30 Orang
		5	Pelaksanaan padat karya di Kabupaten Mandailing Natal	5 Kecamatan
14	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam program kesehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat	1	Persentase pelaksanaan desa siaga aktif	100 %
		2	Persentase Desa yang mencapai Universal Child Immunization (UCI)	98 %
		3	Persentase Rumah Tangga yang melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	50 %
15	Meningkatnya pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1	Persentase pelaksanaan penatakelolaan surat dinas keluar dan surat dinas masuk	100%
		2	Jumlah produk Hukum yang telah ditetapkan	663 Buah
		3	Persentase Perda yang di sosialisasikan kepada masyarakat	30 %
		4	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku	59 SKPD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		5
		5	Jumlah Dokumen pelaksanaan perencanaan pembangunan	5 Dokumen
		6	Frekuensi pengawasan/pemeriksaan internal di lingkungan SKPD	1 x /Tahun
		7	Persentase pelaksanaan LPSE	70 %
		8	Persentase peningkatan pelayanan administrasi kependudukan	70 %
16	Tercapainya tertib pengelolaan keuangan dan aset daerah	1	Persentase pelaksanaan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Keuangan	50 %
		2	Persentase pelaksanaan Sosialisasi tentang Barang Milik Daerah	50 %
		3	Monitoring dan penagihan realisasi PBB Perkotaan dan Perdesaan	2 x /Tahun
		4	Persentase pelaksanaan penertiban pajak reklame dan retribusi daerah	2 x /Tahun
		5	Persentase pelaksanaan pembukuan SPJ SKPD tepat waktu	60 %
		6	Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan BUD	70%
		7	Persentase penerbitan SPD, SP2D dan SPM tepat waktu	60%
		8	Persentase penyusunan SPJ APBD tepat waktu	50 %
		9	Persentase ketepatan waktu pengesahan R-APBD menjadi APBD	80 %
		10	Persentase pengelolaan Barang milik Daerah	60 %
17	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan pelayanan pemerintahan	1	Persentase tingkat penyelesaian kasus-kasus serta pengaduan di lingkungan Pemkab Mandailing Natal	80%
		2	Jumlah Perijinan yang diterbitkan	15 Jenis
		3	Persentase peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat	70%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		5
		4	Persentase penurunan tingkat gangguan gejala sosial di masyarakat	50%
		5	Frekuensi pelaksanaan penyuluhan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	1 Kali
		6	Persentase kepatuhan masyarakat terhadap penegakan Peraturan Daerah	50%
		7	Frekuensi pelaksanaan penyuluhan hukum kepada masyarakat.	1 Kali
18	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah	1	Persentase SKPD yang menyelesaikan LAKIP tepat waktu	50%
		2	Persentase penyelesaian dokumen penetapan kinerja tepat waktu	50%
		3	Persentase SKPD yang memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM)	30%
		4	Persentase penyusunan LAKIP Kabupaten tepat waktu	70%
		5	Persentase Penyusunan LKPJ tepat waktu	70%
		6	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan tepat waktu	70%
19	Tercapainya standar ISO untuk bidang Pelayanan Publik dan Produknya	1	Pelayanan Publik bidang perijinan	SOP
		2	Pelayanan Publik bidang Kesehatan	SPM
		3	Pelayanan Publik bidang Pendidikan	SPM
20	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan	1	Persentase penerapan PNPM	100 %
		2	Persentase pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	100 %
		3	Tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan bulan bhakti gotong royong	50%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		5
		4	Persentase peran aktif PKK dalam mensejahterakan masyarakat	50 %
21	Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mandailing Natal	6,78
22	Menurunnya Angka Kemiskinan	1	Angka Kemiskinan penduduk Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2013	13.50%
23	Meningkatnya rumah tangga yang terlayani jaringan air bersih dan listrik	1	Persentase jumlah penduduk yang menggunakan listrik	95%
		2	Persentase jumlah penduduk yang terlayani jaringan air bersih	50%
24	Wilayah bebas daerah terisolir	1	Persentase daerah terisolir dari wilayah Kabupaten Mandailing Natal	20 %
		2	Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di wilayah terisolir	10 Unit
		3	Pengadaan Pembangkit Listrik Mikrohidro (PLTMH) di wilayah terisolir	1 Unit
25	Optimalisasi potensi dan sumber daya ekonomi di berbagai sektor	1	Angka peningkatan hasil panen petani	179.809 Ton
		2	Jumlah Industri Rumah Tangga Aktif yang dibina Pemerintah Daerah	5 IRT
		3	Persentase peningkatan Industri Rumah Tangga	80%
		4	Peningkatan jumlah wirausahawan baru yang terlatih	41
26	Penurunan tingkat pengangguran terbuka	1	Angka Pengangguran Terbuka Tahun 2013 di Kabupaten Mandailing Natal	5,40 %
27	Meningkatnya pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, pasar dan infrastruktur sosial lainnya	1	Pelaksanaan pembangunan jalan lingkungan di wilayah Kabupaten Mandailing Natal	31Desa
		2	Pembangunan dan Peningkatan Jalan setapak	16 Desa
		3	Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Air Bersih	9 lokasi
		4	Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar	10 Kecamatan